

EVALUASI PENCAPAIAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2020 DAN RENCANA KEGIATAN TA 2021

**BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES**

11 Desember 2020



01

Evaluasi Pencapaian
Kegiatan Dekon Bidang
Kesehatan Tahun 2020
dan Rencana Kegiatan
Tahun 2021

Dasar Hukum

1. Undang-Undang 25 Tahun 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006: Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
3. Peraturan Presiden 65 & 66 Tahun 2015: Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
4. Peraturan Presiden 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Th. 2017: Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga peraturan
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

A. Urgensi Kinerja Anggaran

Meningkatkan *Value for Money* APBN

- ❑ Setiap rupiah APBN harus dikelola secara efisien dan efektif, sehingga penguatan dan pengembangan dalam penganggaran perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan **Value for Money** APBN bagi pembangunan Indonesia
- ❑ Evaluasi merupakan salah satu alat (***tool***) yang dapat digunakan untuk membuktikan (***prove***) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (***feed-back***) perbaikan (***improve***) penganggaran pada periode berikut-berikutnya
- ❑ Tantangan ke depan bagi semua pihak adalah bagaimana setiap **rupiah yang dianggarkan dalam APBN dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan makin baik**, untuk siapa dan apa hasilnya untuk pembangunan Indonesia

B. Cakupan Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran K/L dilakukan berdasarkan amanat **PMK Nomor 214 Tahun 2017** tentang Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan Anggaran K/L.

Evaluasi Kinerja dibagi menjadi 3 aspek yaitu:

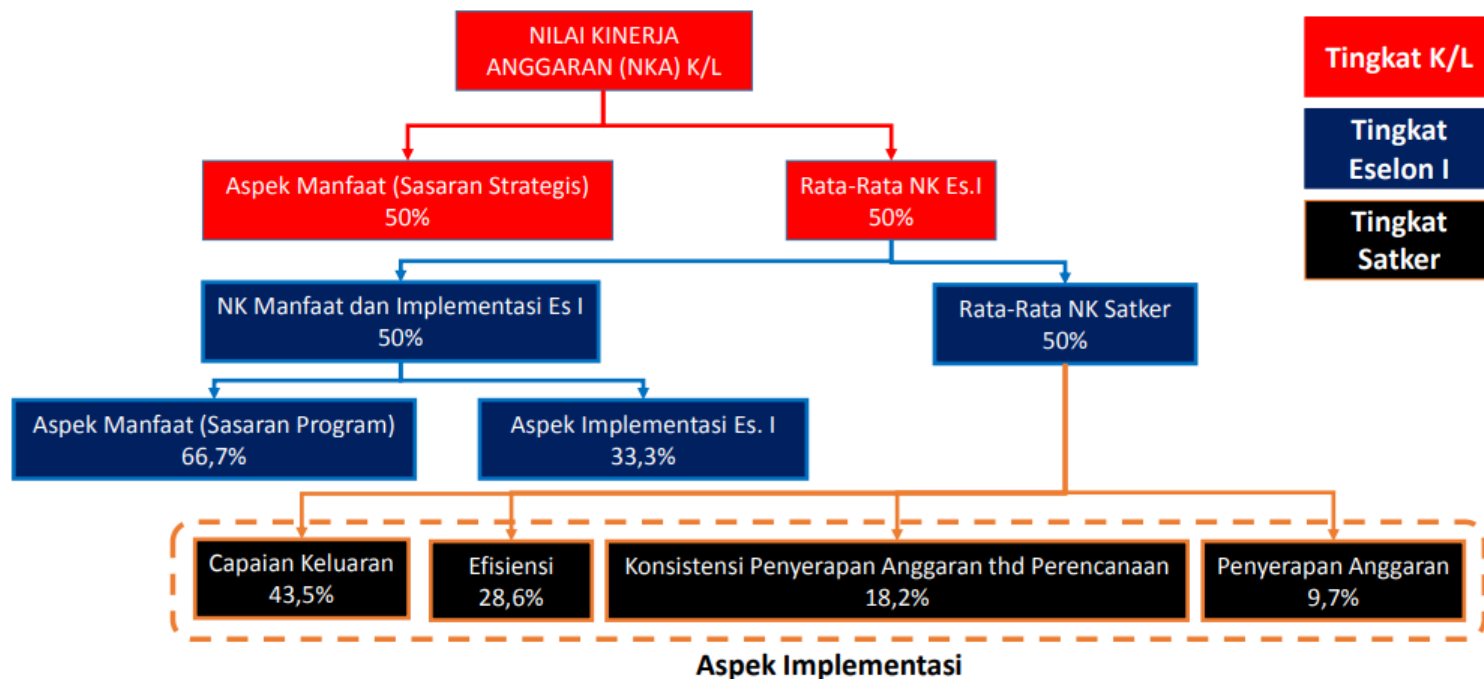
1. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
2. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat
3. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks

Tools E-Monev DJA



PENGENALAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN (3)

C. PENILAIAN KINERJA ANGGARAN



CAPAIAN SASARAN POKOK RPJMN 2020-2024 & PROYEKSI/ CAPAIAN 2020 (1)

Sasaran Pokok	RPJMN 2015-2019			STATUS	RPJMN 2020-2024	
	Capaian 2018	2019 Target	Proyek/ Capaian		2020 Target	Proyek/ Capaian
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	NA	306	243	Tercapai	230	NA
Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	24**)	24	21,7	Tercapai	20,6	NA
Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita (%)	17,7****)	17	17	Tercapai	-	-
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada anak bawah dua tahun (%)	29,9****)	28	28	Tercapai	24,1	12,7
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	250	245	245	Tercapai	272	DT
Prevalensi HIV (%)	0,33	<0,50	0,33	Tercapai	0,21	DT

“Upaya penurunan AKI, AKB, Balita Kurang Gizi, Stunting, TBC dan HIV tahun 2015-2019 **Tercapai**”

DT: Data Tahunan

Catatan:

*) SUPAS, 2015

**) SDKI, 2017

****) Sirkesnas, 2016

*****) Riskesdas, 2018

CAPAIAN RPJMN 2020-2024 & PROYEKSI/ CAPAIAN 2020 (2)

Sasaran Pokok	RPJMN 2015-2019			STATUS	RPJMN 2020-2024	
	Capaian 2018	2019 Target	Proyek/ Capaian		2020 Target	Proyek/ Capaian
Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (%)	34,1 ^{***})	23,4	34,1	Off Track	34,1	34,1
Prevalensi Obesitas penduduk usia 18+ tahun (%)	21,8 ^{***})	15,4	21,8	Off Track	21,8	21,8
Persentase merokok penduduk usia ≤ 18 tahun (%)	9,1 ^{****})	5,4	9,1	Off Track	9,1	9,1
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas terakreditasi	5385	5600	6212 ^{****})	Tercapai	4478	NA
Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	85,41	95	73,74 ^{****})	Off Track	-	-
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	4029	5600	4485 ^{****})	Off Track	-	-

Catatan:

*) SUPAS, 2015

**) SDKI, 2017

***) Sirkesnas, 2016

****) Riskesdas, 2018

*****) Laporan Kemenkes 2019

CAPAIAN RPJMN 2020-2024 & PROYEKSI/ CAPAIAN 2020 (3)

Sasaran Pokok	RPJMN 2020-2024	
	Target	Proyeksi/ Capaian
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	NA
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	8,08	5,60
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	6	8,68
Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	35	39,9
Persentase RS Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya(%)	70	71,67
Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	96,80	96,41

Catatan:

*) SUPAS, 2015

**) SDKI, 2017

***) Sirkesnas, 2016

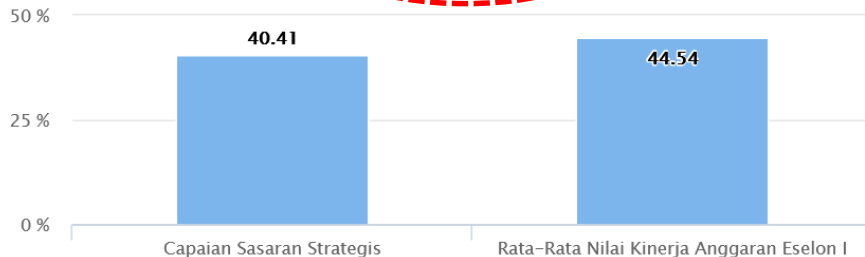
****) Riskesdas, 2018

*****) Laporan Kemenkes 2019

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan per-10 Desember 2020

Pencapaian Kinerja
42.48

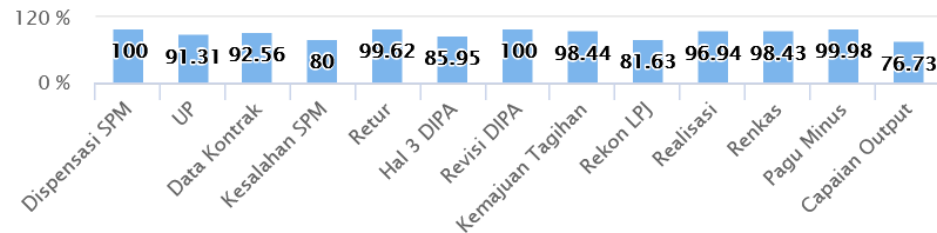
Tahun Anggaran: 2020



* Capaian Sasaran Strategis (CSS) diukur dengan menggunakan formula rata - rata geometrik.

Nilai IKPA
92.44

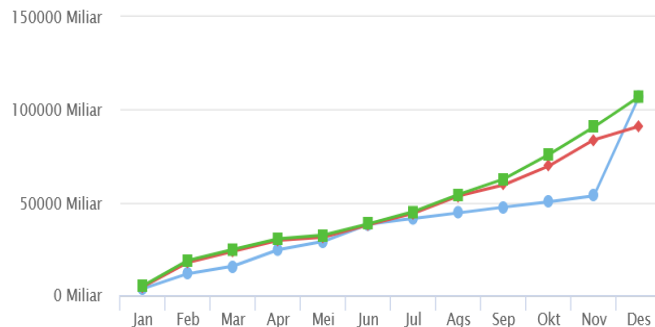
Tahun Anggaran: 2020



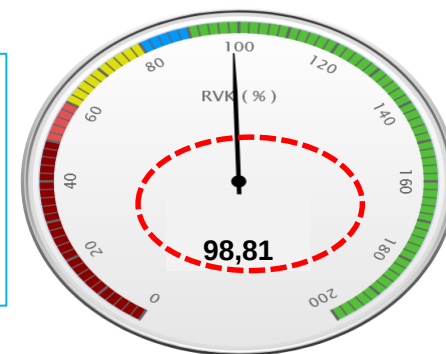
Tahun Anggaran: 2020

Penyerapan Anggaran

Tahun Anggaran: 2020



- Total Pagu 2020: 106,98 T
- Realisasi Anggaran: 91,00 T (85,06%)
- Kinerja Anggaran: 42,48
- Nilai IKPA : 92,44
- Realisasi Vol Keluaran: 98,81%



Sumber: e-Monev DJA per 10 Des. 2020

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran per-Eselon I Kementerian Kesehatan per 10 Desember 2020

No.	Unit Eselon I	Capaian Sasaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Rata-rata Nilai Kinerja Satker	Nilai Kinerja Unit Eselon I
1	SETJEN	74.35	97.72	99.69	91.41	-6,9	36.97	56.06
2	ITJEN	0.20	84.27	96.00	75.00	-12.36	25.65	23.50
3	DITJEN KESMAS	73.83	70.60	91.66	75.00	5.86	29.77	51.94
4	DITJEN YANKES	77.96	75.23	75.92	55.23	-20	26.69	46.86
5	DITJEN P2P	24.22	61.40	88.78	18.95	-20	41.95	34.11
6	DITJEN FARMALKES	100.00	65.28	88.82	100.00	20	41.53	69.87
7	BADAN LITBANGKES	25.18	69.71	87.69	25.18	-20	26.96	27.48
8	BADAN PPSPDMKES	70.53	76.64	87.63	56.81	-20	29.86	46.52

Catatan:

- Masih ada capaian Sasaran Program yang masih rendah
- Masih ada Unit Utama dengan Efisiensi -20
- Nilai Kinerja Unit Es I belum optimal

Nilai Kinerja Anggaran pada e-Monev DJA Per Satuan Kerja di Provinsi Sumatera Utara

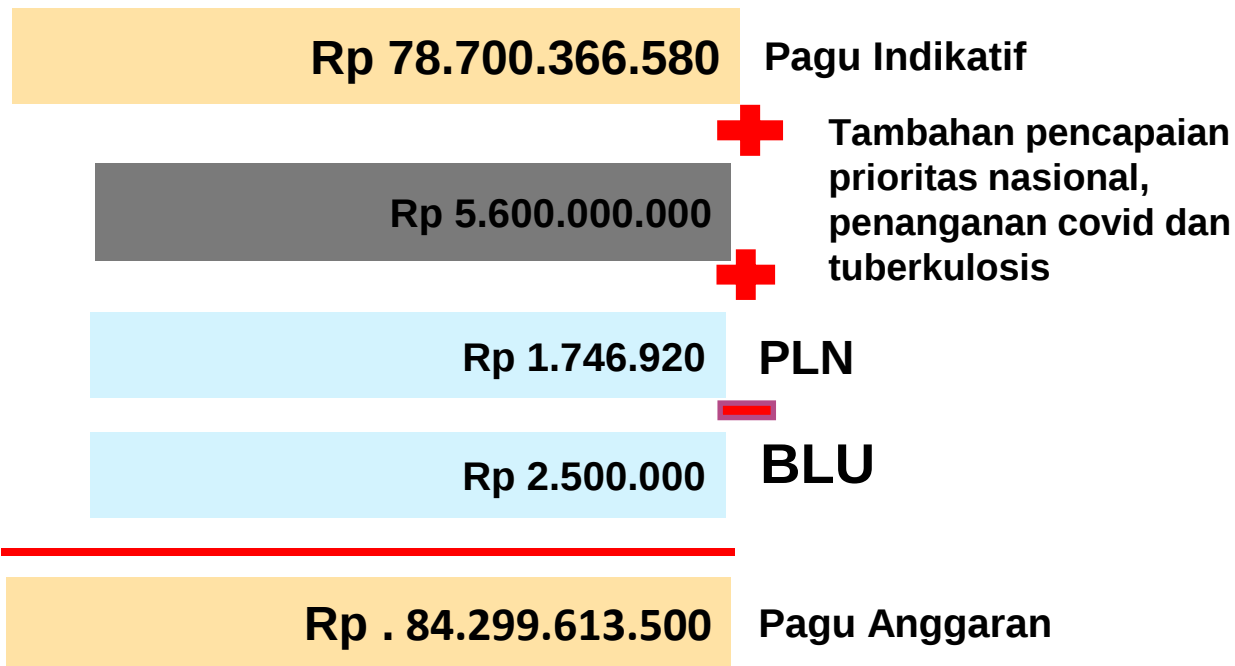
No.	Nama Satker	Penyerapan Anggaran	Konsistensi atas RPD Awal	Konsistensi atas RPD Akhir	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
1	DUKMAN & JKN	73.47	42.86	40.86	0.00	-20	14.56
2	KESMAS	91.62	23.33	82.63	0.00	-20	23.93
3	YANKES	49.16	33.06	78.46	0.00	-20	19.05
4	P2P	88.77	53.45	62.46	39.66	-20	37,23
5	FARMALKES	43.01	11.53	42.84	0.00	-20	11.97
6	PPSDM	56.08	3.07	17.55	0.00	-20	8.83

Catatan:

- Nilai Kinerja Anggaran pada Smart DJA masih rendah
- Terdapat Nilai Efisiensi (-20)
- Capaian Keluaran sebagian besar masih 0,00
- Konsistensi atas RPD Akhir masih yang 0,00
- Penyerapan Anggaran belum optimal (Dukman, Yankes, PPSDMK)

ALOKASI ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2021

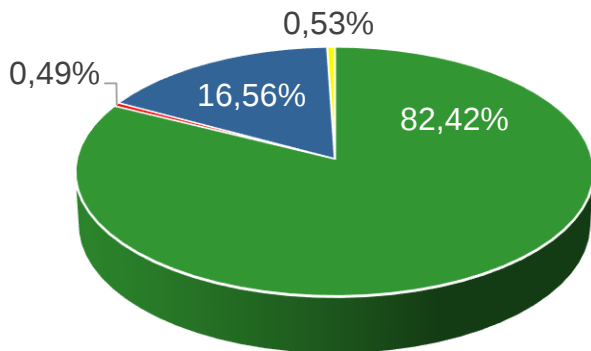
(Ribuan Rupiah)



Berdasarkan Surat Bersama Menkeu No.S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Ka. Bappenas No. B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020
Tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA K/L TA 2021

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2021 BERDASARKAN SUMBER DANA

Dalam Ribuan
Rupiah

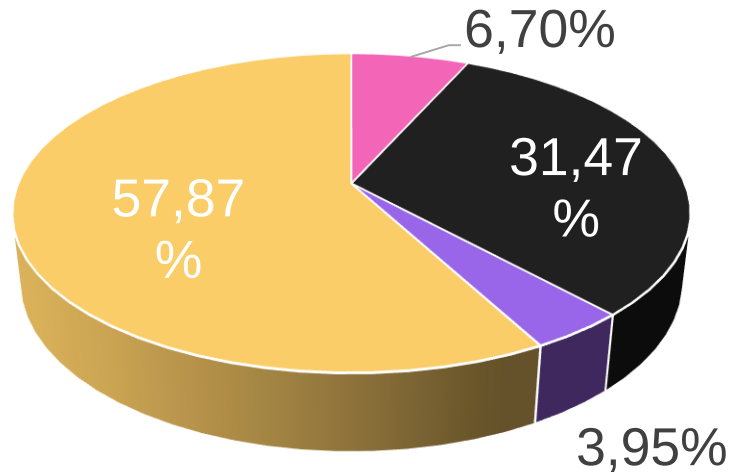


■ RM ■ PNBP ■ BLU ■ PLN

SUMBER DANA	ANGGARAN	PERSEN
1. RM	69.476.024.864	82,42%
<i>a. PBI</i>	<i>48.787.200.000</i>	<i>70,22%</i>
<i>b. Gaji dan operasional</i>	<i>7.300.366.580</i>	<i>11%</i>
<i>c. Kegiatan tupoksi (seperti pengadaan PMT, obat dan vaksin, reagen TB-HIV, penanganan covid-19, penempatan nakes, tugas belajar, surveilans, system informasi serta pelaksanaan program lainnya)</i>	<i>13.388.458.284</i>	<i>19,27%</i>
2. PNBP	409.153.834	0,49%
3. BLU (Utk peningkatan pelayanan RS dan Poltekkes)	13.963.836.882	16,56%
4. PLN (Pembangunan RS Vertikal di Indonesia Timur)	450.597.920	0,53%
TOTAL	84.299.613.500	100,00%

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021 PER JENIS BELANJA

*Dalam Ribuan
Rupiah*



■ B. Pegawai ■ B. Barang
■ B. Modal ■ B. Bansos

JENIS BELANJA	ANGGARAN	PERSEN
B. Pegawai	5.647.938.679	6,70%
B. Barang	26.114.258.847	30,98%
B. Modal	3.750.215.974	4,45%
B. Bansos (PBI BPJS Kesehatan)	48.787.200.000	57,87%
TOTAL	84.299.613.500	100,00%

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Dalam Ribuan Rupiah

NO	UNIT UTAMA	TOTAL	PERSENTASE
1	Sekretariat Jenderal	50.680.081.389	60,12%
2	Inspektorat Jenderal	89.120.733	0,11%
3	Ditjen. Kesehatan Masyarakat	1.980.645.294	2,35%
4	Ditjen. P2P	3.923.155.155	4,65%
5	Ditjen Pelayanan Kesehatan	18.447.099.609	21,88%
6	Ditjen. Kefarmasian dan Alkes	3.367.201.839	3,99%
7	Badan Litbangkes	818.670.995	0,97%
8	Badan PPSDM Kesehatan	4.993.638.486	5,92%
	TOTAL KEMENKES	84.299.613.500	100,00%

Identifikasi Masalah dan Solusi Pelaporan e-moneyv DJA TA 2020

Keluaran Kegiatan

No	Permasalahan	Solusi
1	Tanpa Target Volume	Perbaikan untuk penganggaran tahun berikutnya, tapi satker harus mengisi realisasi volume keluaran , dan mengisi target volume keluaran beserta justifikasinya di kolom keterangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran
2	Ada Pagu dan target, tapi tidak ada Realisasi	Perbaikan untuk penganggaran tahun berikutnya , satker harus memberikan justifikasi di kolom keterangan mengapa output tersebut tidak dilaksanakan
3	Belum melaporkan RVK	Satuan Kerja harus mengisi Total Realisasi Volume Keluaran beserta Keterangan pada Aplikasi SMART, sesuai batas waktu yang ditentukan
4	Tanpa IKK	Output yang tidak memiliki indikator, secara by system akan terisi dengan nilai terendah yaitu target indikator 1 dan persentase realisasi indikator 1%
5	Belum melaporkan capaian IKK	Satuan Kerja harus mengisi Target dan Persentase Realisasi Volume Indikator Keluaran (Output) Kegiatan beserta Keterangan pada Aplikasi SMART, sampai batas waktu yang telah ditentukan
6	IKK bukan milik satker ybs	Satuan Kerja mengisi Target dan Persentase Realisasi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan nilai target indikator 1 dan persentase realisasi indikator 100% , beserta Keterangan yang menyatakan bahwa IKK dimaksud bukan milik satker bersangkutan, sesuai batas waktu yang ditentukan
7	Tanpa referensi (zzz	Program dan Kegiatan yang tidak memiliki referensi akan di cleansing by system

Optimalisasi Evaluasi E-Monev DJA TA 2020

Tingkat Satuan Kerja



- ☐ Operator Satker yang belum pernah login di Tahun 2020, segera login dengan user dan password default, isi profile operator, dan ubah password sesuai ketentuan.
- ☐ Memantau RVK triwulan IV
- ☐ Koordinasi dengan Unit Eselon I untuk revisi atas RVK/Output Cadangan/ Blokir apabila ada
- ☐ Segera mengisi Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) sesuai dengan progres capaiannya, apabila IKK belum dapat dihitung, input data minimal yaitu 1 (dibaca 1%) dan membuat penjelasan pada kolom keterangan.
- ☐ Koordinasi dengan Unit Eselon I apabila tidak mempunyai IKK atau ada perubahan target-targetnya, maupun adanya perubahan kebijakan, dan pastikan data pada SMART sudah sesuai dengan hasil perbaikan/penyesuaian
- ☐ Dalam hal melakukan revisi DIPA, dilakukan juga penyesuaian Halaman III dengan realisasi anggaran
- ☐ Memastikan semua input data sudah benar

LANGKAH2 YANG HARUS DILAKUKAN SETELAH MENERIMA DIPA TA 2021

1.1. Lakukan bedah DIPA

1.2. Segera susun dan patuhi RPK dan RPD

1.3. Segera dilakukan pembukaan blokir

1.4. Identifikasi kegiatan pengadaan baik barang jasa

5. Percepatan pengadaan barang dan jasa

6. Prioritaskan kegiatan untuk mencapai target-target program prioritas

7. Lakukan pengawasan dan monev

8. Gunakan prinsip-prinsip ekonomis, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel

PERJANJIAN KINERJA 2021



- 
1. Patuhi Perjanjian Kinerja
 2. laksanakan kegiatannya
 3. jadikan acuan

PENGUKURAN KINERJA

02

Evaluasi Pencapaian Kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2020 dan Rencana Kegiatan TA 2021



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN 2020

DAK FISIK REGULER

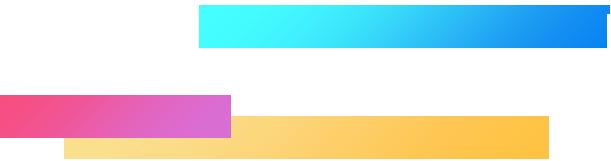
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- Memperkuat pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
- Meningkatkan ketersediaan sediaan farmasi di tingkat Puskesmas

DAK FISIK PENUGASAN

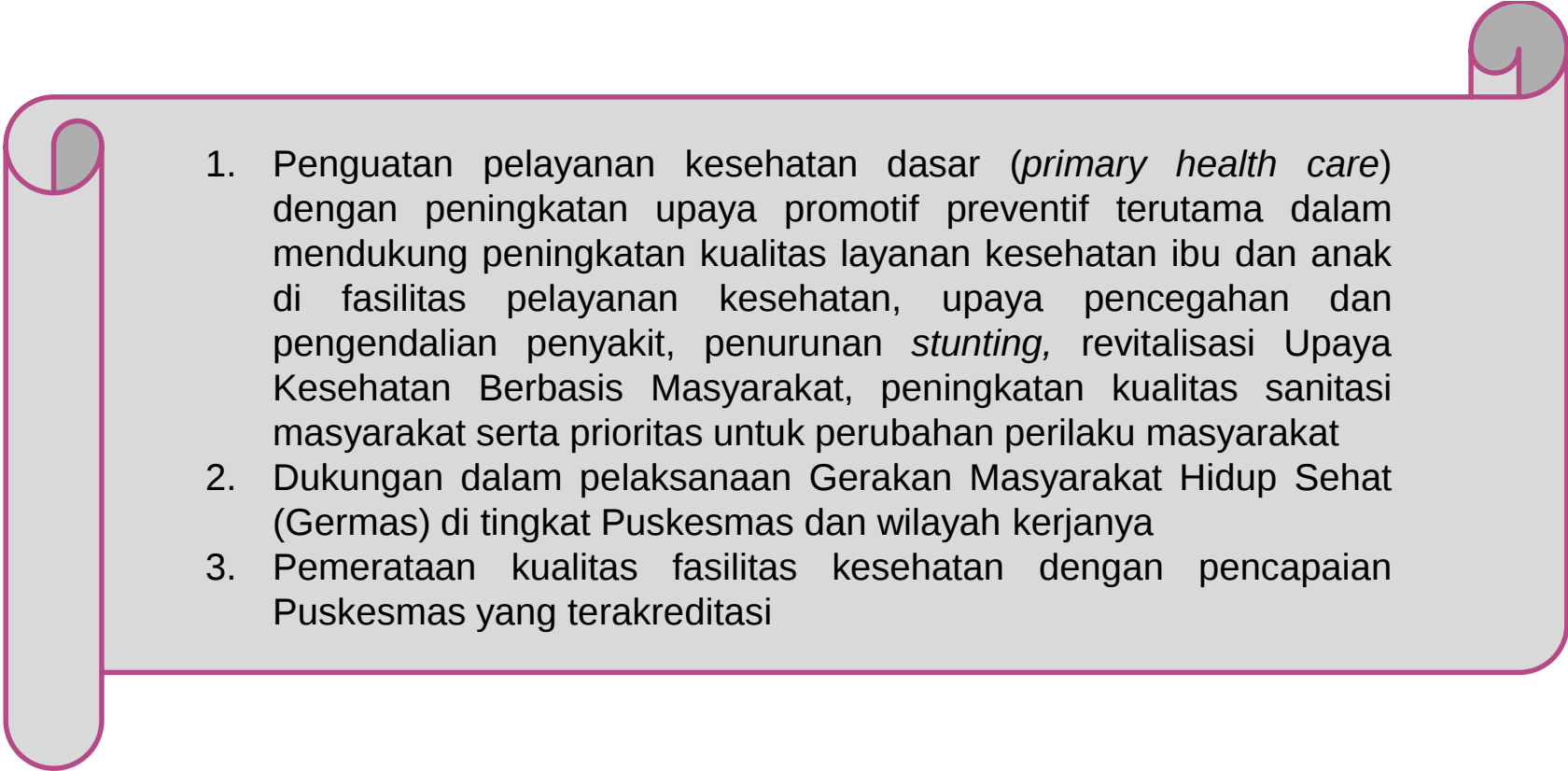
- Mempercepat penurunan *stunting*
- Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
- Meningkatkan kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas

DAK FISIK AFIRMASI

- Penguatan pelayanan kesehatan dasar di DTPK
- Pemenuhan kebutuhan prasarana dasar Puskesmas



ARAH KEBIJAKAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN 2020

- 
1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan peningkatan upaya promotif preventif terutama dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, penurunan *stunting*, revitalisasi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, peningkatan kualitas sanitasi masyarakat serta prioritas untuk perubahan perilaku masyarakat
 2. Dukungan dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat Puskesmas dan wilayah kerjanya
 3. Pemerataan kualitas fasilitas kesehatan dengan pencapaian Puskesmas yang terakreditasi

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2020

DAK FISIK REGULER

1. Subbidang Pelayanan Dasar
2. Subbidang Pelayanan Rujukan
3. Subbidang Pelayanan Kefarmasian

DAK FISIK AFIRMASI

1. Penguatan Puskesmas DTPK
2. Penguatan prasarana dasar Puskesmas

DAK FISIK PENUGASAN

1. Penurunan AKI-AKB
2. Penguatan Intervensi *Stunting*
3. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM
4. Penguatan rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional, pariwisata
5. Pembangunan RS Pratama
6. Puskesmas Pariwisata
7. Balai Pelatihan Kesehatan

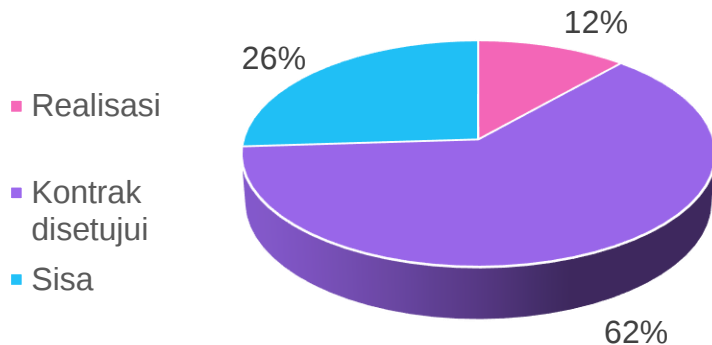
DAK NON FISIK

1. Bantuan Operasional Kesehatan
2. Akreditasi Puskesmas
3. Jaminan Persalinan



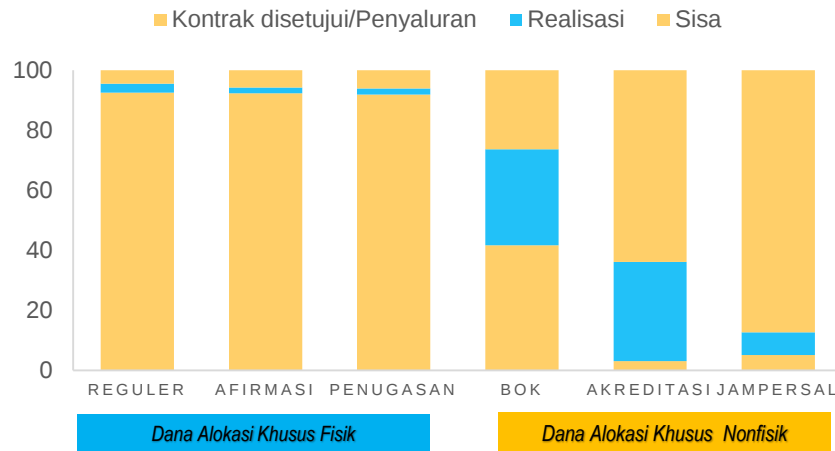
ALOKASI DAN REALISASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2020

Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2020



PAGU	Rp. 29.811.420.121.000
REALISASI	Rp. 3.440.697.115.746
KONTRAK DISETUJUI	RP. 18,618,933,410,003
% REALISASI + KONTRAK DISETUJUI	74%

dalam ribuan rupiah



NO	DAK BIDANG KESEHATAN	PAGU	REALISASI
1	DAK FISIK REGULER	13.181.384.023.000	393,587,234,563
2	DAK FISIK AFIRMASI	3.119.839.493.000	47,075,925,798
3	DAK FISIK PENUGASAN	3.859.776.484.000	88,901,270,254
	Sub Total Fisik	20.161.000.000.000	529,564,430,615
1	DAK NONFISIK BOK	8,040,069,371,000	2,536,550,443,105
2	DAK NONFISIK JAMPERSAL	1,000,000,000,000	328,629,539,201
3	DAK NONFISIK AKREDITASI	610,350,750,000	45,952,702,825
	Sub Total Nonfisik	9,650,420,121,000	2,911,132,685,131

ALOKASI DAN REALISASI DAK FISIK di WILAYAH PROVINSI SUMUT TW-3 TA 2020

Kategori	Subbidang	Pagu	Nilai Kontraktual	Realisasi	%
Reguler	Pelayanan Dasar	242.431.856.608	386.423.445.696	56.852.984.894	23,45%
	Pelayanan Kefarmasian	75.639.949.000	4.313.473.987	12.226.711.713	16,16%
	Pelayanan Rujukan	303.525.519.291	360.489.585.129	68.418.496.644	22,54%
Afirmasi	Penguatan Puskesmas DTPK	65.628.230.156	62.734.685.522	20.463.454.973	31,18%
Penugasan	Penguatan Intervensi Stunting	41.450.200.272	29.654.621.962	4.688.098.513	11,31%
	Penguatan RS Rujukan Nasional/ Provinsi/Regional Pariwisata	37.265.130.000	49.334.821.180	14.878.200.500	39,93%
	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	63.579.993.471	51.824.202.384	6.869.490.595	10,80%
	Penurunan AKI-AKB	14.737.910.052	11.859.856.829	3.095.358.418	21,00%
	Puskesmas Pariwisata	32.076.999.000	31.502.646.539	7.182.447.141	22,39%
Grand Total		876.335.787.850	1.078.137.339.228	194.675.243.391	22,21%

Sumber Data:
e-renggar per 8 Desember 2020

ALOKASI DAN REALISASI DAK NONFISIK di WILAYAH PROVINSI SUMUT TW-3 TA 2020



No	Kategori	Pagu	Realisasi	%
1	Akreditasi Puskesmas	30.048.807.000	3.649.128.125	12,14%
2	BOK Kabupaten/Kota	40.438.469.000	13.739.435.230	33,98%
3	BOK Kefarmasian	5.528.466.000	2.509.544.811	45,39%
4	BOK Provinsi	13.500.539.000	3.853.099.860	28,54%
5	BOK Puskesmas	380.279.413.000	200.285.836.490	52,67%
6	Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal	2.128.101.000	1.029.269.318	48,37%
7	Jampersal	74.181.951.000	25.776.788.235	34,75%
8	Stunting	11.250.000.000	3.698.451.026	32,88%
Grand Total		557.355.746.000	254.541.553.095	45,67%

Sumber Data:
e-renggar per 8 Desember 2020

PEMANFAATAN DAK BIDANG KESEHATAN TA. 2020 UNTUK PENANGANAN COVID 19

DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Pencegahan COVID-19 Tahun Anggaran 2020

DAK FISIK

- Pembangunan dan rehab ruang isolasi tekanan negatif dan non negatif
- Pengadaan alkes ruang isolasi Covid-19
- Peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit
- Bahan habis pakai p2p

DAK NONFISIK

- Kegiatan surveilans dan intervensi faktor risiko Kesehatan lingkungan: Pemenuhan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), masker, *hand sanitizer*, sarung tangan, bahan desinfektan
- Pengambilan dan/atau pengiriman rujukan pengujian specimen Covid-19 ke Lab yang ditunjuk pemerintah.
- Kegiatan untuk BOK selain yang tercantum dalam Kepmenkes Nomor HK.O1 .07/Menkes/215/2020 tetap dapat digunakan untuk Penanganan COVID-19 tanpa merubah nomenklatur kegiatan sesuai Permenkes No. 86/2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik TA 2020.

REKAPITULASI DAERAH DALAM REFOCUSING RENCANA KEGIATAN DAK TA. 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19

SUBIDANG DAK	JUMLAH DAERAH	ANGGARAN
DAK FISIK REGULER		
Pelayanan Rujukan	188	528.060.203.552
DAK FISIK PENUGASAN		
Penguatan RS Rujukan	28	144.037.691.115
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	145	35.792.261.531
<i>Total DAK Fisik</i>	<i>273</i>	<i>707.890.156.199</i>
DAK NONFISIK		
BOK Provinsi	6	44.883.598.980
BOK Kabupaten/Kota	71	139.283.611.000
BOK Puskesmas	37	485.552.642.000
<i>Total DAK Nonfisik</i>	<i>114</i>	<i>669.719.851.980</i>
Total DAK Bidang Kesehatan	417	1.377.610.008.179

Sumber: KRISNA DAK dan E-Renggar Kemenkes



REFOCUSING RENCANA KEGIATAN DAK TA. 2020 UNTUK PENANGANAN COVID-19 di WILAYAH PROVINSI SUMUT

JENIS	SUBBIDANG	JUMLAH DAERAH	ANGGARAN REVISI
DAK FISIK	Subbidang Pelayanan Rujukan	12	18.926.714.129
	Subbidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	6	1.950.627.000
	Subbidang Penguatan RS Rujukan Nasional/ Provinsi/Regional Pariwisata	1	11.647.129.547
DAK NON FISIK	BOK Kabupaten/Kota	1	1.246.086.000
	BOK Provinsi	-	-
	BOK Puskesmas	1	12.940.736.000
GRAND TOTAL		15	46.711.292.676



KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2021

1

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari DAK Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik terdiri jenis DAK reguler dan DAK penugasan. DAK Nonfisik terdiri BOK, Akreditasi dan Jampersal

2

DAK Fisik Reguler difokuskan untuk pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, RSUD, Instalasi Farmasi dan Labkesda

3

DAK Fisik penugasan difokuskan untuk menurunkan AKI-AKB dan penguatan intervensi stunting sesuai prioritas nasional

4

DAK Nonfisik difokuskan untuk mendanai pelayanan dasar yang bersifat bantuan operasional kesehatan, dukungan akreditasi dan jaminan persalinan

ARAH KEBIJAKAN

DAK FISIK

1. Peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan)
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan stunting
3. Peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan AKI dan AKB
4. Penguatan GERMAS melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat

DAK NONFISIK

1. Peningkatan kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam upaya penggerakan promotif dan preventif
2. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepatan penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi tingkat Provinsi dan Kab/Kota
3. Peningkatan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah

RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN (REGULER)

Subbidang Pelayanan Dasar

1. Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas
2. Penyediaan prasarana Puskesmas
3. Penyediaan alat kesehatan Puskesmas

Subbidang Pelayanan Rujukan

1. Pembangunan dan rehabilitasi RS
2. Penyediaan prasarana RS
3. Penyediaan alat kesehatan RS



Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai

1. Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi
2. Penyediaan obat dan bahan habis pakai

Subbidang Kesiapan Peningkatan Sistem Kesehatan

1. Penyediaan alat deteksi dini penyakit
2. Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah
3. Pembangunan RS Pratama
4. Penyediaan Telemedicine

RUANG LINGKUP / MENU KEGIATAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN (PENUGASAN)

Subbidang
Penguatan Intervensi
Stunting
(Major Project)

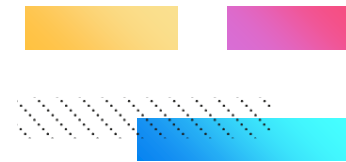
1. Penyediaan makanan tambahan
2. Penguatan promosi, surveillans dan tata laksana gizi

Subbidang
Penguatan Penurunan
Angka Kematian Ibu
dan Bayi

1. Penguatan Puskesmas PONEK
2. Penguatan Sarana Pelayanan RS PONEK
3. Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan RS PONEK
4. Penguatan PSC 119



RUANG LINGKUP DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN TA 2021



BOK

1. BOK Provinsi
2. BOK Kab/Kota
3. BOK Puskesmas
4. BOK Kefarmasian dan Alkes
5. BOK Stunting



Jampersal

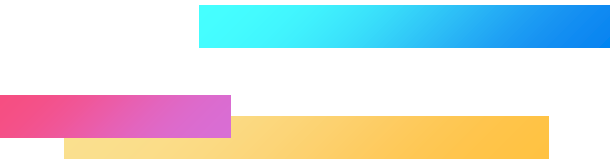
Dukungan Akreditasi

1. Dukungan Akreditasi Puskesmas
2. Dukungan Akreditasi Labkesda

Alur Proses Perencanaan dan Penganggaran DAK

Stake Holder	Menu DAK	Pembahasan menu		Usulan Daerah	Penilaian		Sinkronisasi dan Alokasi			Penyusunan RK	
Kemenkeu		Pembahasan Menu pada Multilateral Meeting				Exercise Pagu Indikatif			Pembahasan dan penetapan Anggaran		
Bappenas			Penyusunan Aplikasi Krisna (DAK Fisik)								
Kemenkes	Mengusulkan rancangan menu DAK Pada foru Multilateral Meeting (MM)		Penyusunan Aplikasi Erenggar (DAK Nonfisik)		Melakukan Penilaian Usulan DAK		Konfirmasi Pusat dan Daerah	Finalisasi Penilaian dan Mengusulkan pagu perdaerah		Pembahasan Penyusunan RK	Penetapan RK oleh Menteri Kesehatan
Daerah				Menginput Usulan DAK							

Aspirasi



TIMELINE PERENCANAAN dan PENGANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2021



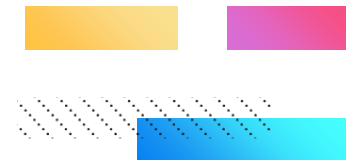


ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2021

NO	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	DAK FISIK REGULER	14.956.493.100.000
2	DAK FISIK PENUGASAN	5.149.706.900.000
TOTAL DAK FISIK		20.106.200.000.000
1	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	8.896.098.250.000
2	DUKUNGAN AKREDITASI MELALUI PENERAPAN STANDARISASI PUSKESMAS	610.350.750.000
3	DUKUNGAN AKREDITASI MELALUI PENERAPAN STANDARISASI LABKESDA	21.744.000.000
4	JAMPERSAL	1.000.000.000.000
TOTAL DAK NON FISIK		10.528.193.000.000
TOTAL DAK BIDANG KESEHATAN		30.634.393.000.000

RINCIAN ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2021 DI WILAYAH PROVINSI SUMUT

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes No. PR.01.01/I/4082/2020
tanggal 20 Oktober 2020



NO	JENIS DAK FISIK	ALOKASI
1	DAK Fisik Reguler	678.256.841.000
2	DAK Fisik Penugasan	141.940.595.000
TOTAL		820.197.436.000

NO	JENIS DAK NON FISIK	ALOKASI
1	BOK	521.401.305.000
2	Jampersal	65.139.532.000
3	Dukungan Akreditasi	40.239.615.000
TOTAL		626.780.452.000

RINCIAN ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2021 DI WILAYAH PROVINSI SUMUT (1)

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes No. PR.01.01/I/4082/2020
tanggal 20 Oktober 2020

KAB/KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	TOTAL
Kab. Asahan	13.580.317.000	15.936.120.000	29.516.437.000
Kab. Batu Bara	11.395.282.000	15.257.322.000	26.652.604.000
Kab. Dairi	23.987.587.000	17.654.309.000	41.641.896.000
Kab. Deli Serdang	20.688.523.000	39.126.612.000	59.815.135.000
Kab. Humbang Hasundutan	10.682.180.000	14.870.988.000	25.553.168.000
Kab. Karo	20.556.050.000	19.147.216.000	39.703.266.000
Kab. Labuhanbatu	25.983.659.000	15.608.820.000	41.592.479.000
Kab. Labuhanbatu Selatan	57.340.446.000	16.226.017.000	73.566.463.000
Kab. Labuhanbatu Utara	28.579.107.000	18.885.722.000	47.464.829.000
Kab. Langkat	15.634.903.000	32.564.501.000	48.199.404.000
Kab. Mandailing Natal	84.420.642.000	30.332.396.000	114.753.038.000
Kab. Nias	21.903.635.000	13.837.626.000	35.741.261.000
Kab. Nias Barat	10.031.797.000	11.679.532.000	21.711.329.000
Kab. Nias Selatan	47.755.367.000	50.661.942.000	98.417.309.000
Kab. Nias Utara	25.664.670.000	14.860.356.000	40.525.026.000
Kab. Padang Lawas	20.633.740.000	20.187.615.000	40.821.355.000
Kab. Padang Lawas Utara	20.414.162.000	17.284.587.000	37.698.749.000
Kab. Pakpak Bharat	13.473.699.000	6.434.510.000	19.908.209.000
Kab. Samosir	10.822.310.000	12.091.558.000	22.913.868.000

RINCIAN ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2021 DI WILAYAH PROVINSI SUMUT (2)

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes No. PR.01.01/I/4082/2020
tanggal 20 Oktober 2020

KAB/KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	TOTAL
Kab. Serdang Bedagai	25.047.462.000	21.909.488.000	46.956.950.000
Kab. Simalungun	41.974.250.000	43.879.038.000	85.853.288.000
Kab. Tapanuli Selatan	19.153.839.000	16.386.742.000	35.540.581.000
Kab. Tapanuli Tengah	15.542.420.000	25.450.834.000	40.993.254.000
Kab. Tapanuli Utara	14.266.921.000	19.744.452.000	34.011.373.000
Kab. Toba Samosir	18.209.030.000	18.047.514.000	36.256.544.000
Kota Binjai	15.581.469.000	7.288.937.000	22.870.406.000
Kota Gunungsitoli	15.527.527.000	7.617.475.000	23.145.002.000
Kota Medan	35.322.151.000	33.017.183.000	68.339.334.000
Kota Padangsidimpuan	15.435.362.000	8.972.791.000	24.408.153.000
Kota Pematang Siantar	10.796.656.000	14.207.113.000	25.003.769.000
Kota Sibolga	9.327.526.000	4.696.392.000	14.023.918.000
Kota Tanjung Balai	18.163.258.000	6.296.642.000	24.459.900.000
Kota Tebing Tinggi	18.732.316.000	7.125.862.000	25.858.178.000
Provinsi Sumatera Utara	63.569.173.000	9.492.240.000	73.061.413.000
GRAND TOTAL	820.197.436.000	626.780.452.000	1.446.977.888.000

Terima kasih

